

1. DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1999. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_____, 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*

_____, 2000. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

_____, 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*

_____, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah..*

_____, 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

_____, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

_____, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.*

_____, 2008. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah..*

Bachtiar, Nasri (2010), *Pembangunan Pedesaan Dan Kemiskinan : Beberapa persoalan terkait ruu desa*, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

Bastian, Indra (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi Keempat, Salemba empat, Jakarta.

Freeman, RJ & Shoulder, C.D (2003). *Governmental Nonprofit accounting : Theory and Practice*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Keempat, Andi, Yogyakarta.

Nordiawan, Deddi, Ayuningtyas Hertanti (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan ketiga, Salemba Empat, Jakarta

Riyadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Rajawali, Jakarta.

Suparmoko, M (2000), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta

Tjokroamidjojo, Bintoro (1995), *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.

Yandra, Febie (2011), *Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010*, Universitas Andalas, Padang.

Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 100% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 82,72%, hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak masuk pada RKA atau sebaliknya ada di RKA tapi tidak ada di RENJA. Hal ini menunjukkan bahwa RENJA tidak menjadi acuan yang mendasar bagi penyusunan RKA setiap tahunnya.

Dimana hasil analisis konsistensi menunjukkan bahwa konsistensi 100 persen berada diantara program dan konsistensi antar kegiatan 82,72 persen, tingkat konsistensi yang sangat kuat ditunjukkan.

Namun kegiatan-kegiatan tersebut tidak terdapat dalam RKA atau sebaliknya di RKA tapi tidak di RENJA tetap dijalankan.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk penyusunan RKA

Setiap tahun, RENJA bukanlah panduan yang sederhana.